

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2002, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta
- Abidin, Said Zainal, 2002, *Perspektif Baru Dalam Sistem Pengelolaan Pemerintahan*, Millennium Publisher, Jakarta
- Bratakusumah, Deddy Supriady, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Jakarta Utama, Jakarta
- Djumara, Noorsyamsa, 1994, *Menuju Format Baru Pelayanan Umum*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P, 1990, *Filsafat Administrasi*, CV. Haji Masagung
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung
- Thoha, Miftah, 2002, *Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tjiptoherijanto, Prijono, 2004, *Kependudukan, Birokrasi dan Reformasi Ekonomi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Umar, Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya

- Lembaga Administrasi Negara, 2003, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, Jakarta
- Departemen Dalam Negeri, 2004, *Modul Pelayanan Prima Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Jakarta
- Undang – undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian.
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.
- SK Mendagkop Nomor 155/Kp/IV/80 tentang Biaya Retribusi Pengeluaran Formulir Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia.
- SK Mendag Nomor 73/Kep/V/1993 tentang Tarif dan Biaya Administrasi WDP
- SK Menperindag Nomor : 105 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
- SK Memperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
- SK Menperindag Nomor : 509 / MPP / Kep / 10 / 1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- SK Menperindag Nomor : 78 / MPP / Kep / 3 / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Industri dan Perdagangan.
- SK Menperindag Nomor : 189 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- SK Menperindag Nomor : 111 / MPP / Kep / 2 / 2003 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia.
- SK Menpan Nomor : 63 / Kep / M. PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- SK Menpan Nomor : Kep / 25 / M. PAN / 2 / 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- SK Menperindag Nomor : 596 / MPP / Kep / 9 / 2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta .
- SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.
- SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 3586 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan dan Pemberian Izin di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan di Propinsi DKI Jakarta.